

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL DI KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO**

Isnaein Fharhan Ibrahim
NPP. 32.0962

Asdaf Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: isnaeinfarhanibrahim1903@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Nur Ichsan Amin, SH., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Gorontalo Regency is the most populous area in Gorontalo Province and has high potential for local food production, especially corn. However, high corn production is not followed by diverse community consumption patterns. This is reflected in the low score of the Expected Food Pattern (PPH) of Gorontalo Regency which only reached 76.10 and is still far from the national target of 94. The Gorontalo Regency Government has pursued a policy of diversifying local food consumption as part of a food security strategy. Purpose:* This study aims to analyze and describe the implementation of the policy of diversifying local food consumption in Gorontalo Regency. **Method:** *The approach used in this study is descriptive qualitative with an inductive method. Data collection techniques are carried out through triangulation which combines observation, interviews, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model which includes data condensation, data presentation, and drawing conclusions. This study uses the policy implementation theory according to Knill & Tosun (2020). Result:* The results of the study indicate that the implementation of the policy of diversifying local food consumption has been running but has not been optimal. Several obstacles found include minimal coordination between OPDs, lack of ongoing education for the community, and limited participation of local business actors in providing local food. **Conclusion:** *Therefore, it is necessary to strengthen cross-sector collaboration and a more massive public communication strategy to increase the use of local food in the community.*

Keywords: *Implementation, Diversification, Consumption, Local Food*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan populasi terbanyak di Provinsi Gorontalo serta memiliki potensi produksi pangan lokal yang tinggi, khususnya jagung. Namun, tingginya produksi jagung tidak diikuti dengan pola konsumsi masyarakat yang beragam. Hal ini tercermin dari rendahnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gorontalo yang hanya mencapai 76,10 dan masih jauh dari target nasional sebesar 94. Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengupayakan kebijakan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendeskripsikan implementasi kebijakan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo. **Metode:** Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yang menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan panganekaragaman konsumsi pangan lokal telah berjalan namun belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi minimnya koordinasi antar OPD, kurangnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta keterbatasan partisipasi pelaku usaha lokal dalam penyediaan pangan lokal. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor serta strategi komunikasi publik yang lebih masif untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal di masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Panganekaragaman, Konsumsi, Pangan Lokal

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikaruniai kekayaan alam yang sangat berlimpah. Sumber daya tersebut mencakup hutan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, sumber daya tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan tembaga, serta lahan pertanian yang subur yang tersebar di berbagai wilayah. Potensi ini tidak hanya menjadi aset lingkungan, tetapi juga memiliki nilai strategis yang sangat besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh apabila dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan (Situmorang dkk., 2024; Irham *et al.*, 2024). World Bank mencatat bahwa hutan tropis Indonesia, sebagai kawasan terluas ketiga di dunia, mencakup sekitar 1,3% permukaan bumi dan menjadi habitat bagi 10% spesies tanaman dan bunga, 12% mamalia, 17% burung, dan 25% ikan di dunia (Widiyati, 2012). Dengan potensi sebesar itu, Indonesia seharusnya mampu membangun ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemenuhan hak atas pangan, pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Kebijakan tersebut turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-2 yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*). Tujuan ini mencakup penghapusan kelaparan, peningkatan ketahanan pangan, perbaikan gizi, serta pengembangan pertanian berkelanjutan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional belum stabil secara merata. Berdasarkan laporan Economist Impact (2022), Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP), dengan skor 60,2 yang masih berada di bawah rata-rata global sebesar 62,2 dan rata-rata kawasan Asia Pasifik sebesar 63,4. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam mengelola potensi sumber daya untuk mendukung sistem pangan nasional yang tangguh.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat pada Provinsi Gorontalo yang pada tahun 2023 mencatatkan IKP sebesar 81,63 dan menempati posisi ke-9 secara nasional. Meskipun angka tersebut menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang tergolong baik dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan, namun data Pola Pangan Harapan (PPH) justru menunjukkan skor yang rendah, yaitu hanya 76,10 dan menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai daerah dengan skor PPH keempat terendah di Indonesia (Badan Pangan Nasional, 2024). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tingginya indeks ketersediaan pangan belum sepenuhnya mencerminkan keragaman konsumsi pangan masyarakat, yang merupakan indikator penting dalam menciptakan ketahanan pangan yang sehat dan berkelanjutan.

Skor PPH yang rendah di Provinsi Gorontalo disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang masih sangat bergantung pada satu jenis sumber karbohidrat utama, yaitu beras. Data menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kabupaten Gorontalo mencapai 109,87 kg/kapita/tahun, sedangkan konsumsi jagung hanya sebesar 4,93 kg/kapita/tahun. Padahal,

jagung merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber pangan lokal alternatif. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu jenis pangan tidak hanya menghambat diversifikasi konsumsi, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap krisis pangan apabila terjadi gangguan pasokan. Keberlanjutan sistem pangan lokal sangat bergantung pada koherensi kebijakan serta kemampuan untuk menghubungkan antara produksi dengan praktik konsumsi berkelanjutan (Stein & Santini, 2022). Dalam hal ini, diversifikasi konsumsi pangan lokal menjadi strategi yang sangat penting untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan secara lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Kabupaten Gorontalo menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Gorontalo yang telah memiliki regulasi khusus mengenai penganekaragaman konsumsi pangan lokal, yakni melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan menargetkan pencapaian skor PPH sebesar 95 sebagai indikator keberhasilan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi lintas sektor yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal, serta kurangnya edukasi dan promosi terkait pentingnya konsumsi pangan lokal secara beragam. Capaian skor PPH Kabupaten Gorontalo yang hanya mencapai 79,60 pada tahun 2023 menjadi indikator bahwa target tersebut belum tercapai secara maksimal (Badan Pangan Nasional, 2024).

Melihat kondisi tersebut, maka penting untuk melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan tersebut guna mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaannya, faktor-faktor penghambat dan pendukungnya, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan hasil yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 sebagai bentuk intervensi kebijakan dalam mendorong ketahanan pangan berbasis konsumsi lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual guna memperkuat sistem pangan lokal dan mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini berangkat dari persoalan implementasi kebijakan daerah, khususnya Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal secara lebih beragam dan seimbang. Di samping itu, penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, serta upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengoptimalkan implementasinya.

Kesenjangan yang melatarbelakangi penelitian ini terlihat dari kondisi faktual di Kabupaten Gorontalo. Meski secara nasional provinsi ini memiliki skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang cukup tinggi, yaitu mencapai 81,63 dan menempati posisi ke-9 tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2023, namun skor Pola Pangan Harapan (PPH) justru masih berada di angka 79,60, jauh dari target ideal nasional sebesar 95. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa meskipun aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan tergolong baik, keragaman konsumsi pangan masyarakat masih belum optimal. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas implementasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal yang telah dijalankan selama lebih dari satu dekade.

Beberapa studi sebelumnya memang telah membahas isu diversifikasi pangan, namun belum secara khusus mengkaji secara mendalam aspek implementasi kebijakan daerah yang

bersifat lokal dan spesifik seperti yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo. Misalnya, penelitian oleh Harnanda (2020) lebih berfokus pada program diversifikasi pangan di wilayah perkotaan seperti Pekanbaru melalui pendekatan KRPL, bukan pada kebijakan lokal yang berbasis regulasi kepala daerah. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2022) dan Heryadi *et al.* (2024) cenderung mengangkat dampak diversifikasi terhadap pelaku UMKM dan rumah tangga, tanpa menyoroti proses implementasi dan peran aktor pelaksana di tingkat pemerintahan. Bahkan studi yang dilakukan oleh Baderan (2024), meskipun mengangkat objek kebijakan yang sama, belum membahas secara mendalam bagaimana koordinasi kelembagaan, kapasitas pelaksana, serta partisipasi masyarakat memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Dengan memperhatikan kesenjangan tersebut, maka penelitian ini hadir untuk mengisi ruang yang belum banyak dijelajahi, yakni dengan menyoroti secara khusus implementasi kebijakan daerah dalam konteks penganekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020) yang menawarkan kerangka analisis komprehensif, mulai dari pemilihan instrumen, kejelasan desain kebijakan, struktur kelembagaan, kapasitas administratif, hingga penerimaan sosial. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan, serta mengidentifikasi berbagai dinamika, kendala, dan peluang yang muncul selama proses implementasi berlangsung.

Penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait kebijakan pangan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya dalam mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus rekomendasi bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Gorontalo agar arah pembangunan pangan lebih adaptif dan berkelanjutan di masa mendatang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Penelitian ini merujuk pada lima studi terdahulu yang relevan dengan tema diversifikasi konsumsi pangan lokal dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Kelima penelitian ini menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi pendekatan yang telah digunakan sebelumnya, serta untuk melihat ruang kontribusi ilmiah yang dapat diisi melalui penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Harnanda (2020) dalam studinya yang berjudul “Implementasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru (Studi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program diversifikasi melalui kegiatan KRPL belum optimal, khususnya dalam hal koordinasi dan partisipasi masyarakat. Fokus utamanya berada pada level rumah tangga di lingkungan perkotaan, serta tidak secara mendalam membahas implementasi regulasi pemerintah daerah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Putri dkk. (2022) dalam kajiannya mengenai “Implementasi Program Diversifikasi Produk Pangan Lokal di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah”. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis Fishbone dan SWOT, penelitian ini menyoroti bagaimana program diversifikasi pangan berhasil meningkatkan konsumsi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap beras. Penelitian ini menunjukkan peran positif kebijakan terhadap pelaku UMKM dan kelompok wanita tani, namun belum mengkaji aspek regulasi daerah secara spesifik.

Selanjutnya, Heryadid kk. (2024) meneliti “Implementasi Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya dalam Menu Keluarga untuk Menunjang Ketahanan Pangan”. Menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini menunjukkan

bahwa hanya sebagian kecil keluarga yang secara rutin mengonsumsi pangan lokal, dan faktor pendidikan serta pendapatan memiliki pengaruh signifikan. Penelitian ini lebih menyoroti perilaku konsumen daripada proses kebijakan publik di lingkungan pemerintahan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Baderan (2024) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dijalankan, pelaksanaannya belum mencapai skor ideal Pola Pangan Harapan. Fokusnya adalah pada pelaksanaan kebijakan, namun belum mendalami secara sistematis peran aktor, kelembagaan, dan strategi komunikasi yang mendukung proses implementasi.

Sementara itu, penelitian kelima dikemukakan oleh Feriyanto dkk. (2017) dalam studi berjudul “Diversifikasi Komoditas Pangan Unggulan Lokal Berbasis Agropolitan di Daerah Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta”, menekankan pentingnya pendekatan wilayah dalam strategi diversifikasi pangan dengan memanfaatkan konsep agropolitan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengembangan komoditas lokal seperti jagung, ubi, dan ketela dapat diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya pemerintah daerah dan komunitas lokal. Penelitian ini memberikan pandangan penting tentang kebijakan ketahanan pangan yang berbasis potensi dan karakteristik lokal.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun isu diversifikasi pangan dan ketahanan pangan lokal telah banyak diteliti, sebagian besar masih berfokus pada dampak terhadap masyarakat, program sektoral, atau wilayah tertentu tanpa secara eksplisit mengkaji implementasi kebijakan berbasis regulasi kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan menelaah secara mendalam implementasi Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 melalui pendekatan teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun (2020). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan, interaksi antar-aktor, desain kelembagaan, serta faktor penerimaan sosial yang berperan dalam keberhasilan kebijakan di Kabupaten Gorontalo.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui fokus analisis terhadap implementasi Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya membahas diversifikasi pangan dalam konteks program atau perilaku konsumsi rumah tangga, penelitian ini secara eksplisit menelusuri bagaimana regulasi kepala daerah diimplementasikan oleh aktor-aktor lokal, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong pencapaian pola pangan harapan (PPH) di masyarakat.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020), yang menekankan enam dimensi penting dalam proses implementasi: tujuan kebijakan, aktor pelaksana, instrumen, struktur institusional, target penerima, dan konteks penerimaan sosial. Dengan menggunakan teori ini, penelitian mampu mengurai secara lebih rinci bagaimana kebijakan lokal tidak hanya dirumuskan, tetapi juga dijalankan dalam dinamika pemerintahan daerah. Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam studi-studi sebelumnya yang cenderung menggunakan teori klasik seperti Van Meter-Van Horn atau model *top-down* semata.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu seperti Harnanda (2020), Putri dkk. (2022), maupun Heryadi dkk. (2024), yang lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program diversifikasi pangan tanpa membedah aspek regulasi secara mendalam, penelitian ini secara

husus menelaah kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah (bupati) dan menyelidiki bagaimana proses implementasinya berlangsung di lapangan. Bahkan dibandingkan dengan penelitian Baderan (2024) yang menggunakan objek kebijakan yang sama, penelitian ini memperluas cakupan analisis dengan mengaitkan kebijakan dengan dinamika kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta daya dukung sosial-budaya masyarakat dalam menerima dan menjalankan kebijakan.

Penelitian ini menjadi relevan dan signifikan karena menyajikan studi kebijakan pangan berbasis lokal yang kontekstual, menyandingkan realitas implementasi kebijakan dengan data capaian IKP dan PPH yang menunjukkan adanya kesenjangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur dalam bidang implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai pentingnya pendekatan kebijakan berbasis potensi lokal untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat pemerintah daerah, serta menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor pelaksana untuk mencapai target Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis sumber daya lokal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan yang kompleks, yang melibatkan banyak aktor dan berlangsung dalam konteks sosial tertentu. Taherdoost (2022) menambahkan bahwa pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk mengeksplorasi variabel-variabel yang tidak terstruktur, seperti persepsi dan pengalaman aktor kebijakan dalam konteks sosial tertentu. Peneliti tidak hanya berusaha mengetahui hasil kebijakan, tetapi juga memahami bagaimana kebijakan dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta interaksi antar-pelaksana dan penerima kebijakan di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini mampu mengungkap makna, dinamika, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan secara lebih holistik. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurdin & Hartati (2018), dalam penelitian sosial, metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif informan.

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang memiliki kebijakan khusus mengenai penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010. Fokus utama penelitian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan tersebut oleh instansi teknis dan masyarakat penerima manfaat, khususnya di wilayah yang memiliki skor Pola Pangan Harapan (PPH) rendah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan kebijakan, serta data statistik dari instansi pemerintah. Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk memilih informan yang relevan dengan implementasi kebijakan, dan *snowball sampling* untuk menjangkau informan tambahan di lapangan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo, karena memiliki tanggung jawab langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program diversifikasi

konsumsi pangan di daerah. Selain itu, informan lain meliputi pejabat teknis pada Dinas Pertanian, aparat desa, serta perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar variabel yang muncul dari data kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik *transferability* guna memastikan keteralihan konteks hasil penelitian, dan *dependability* untuk menjamin konsistensi data dengan prosedur pengumpulan dan analisis yang dapat dilacak. Menurut Sugiyono (2019), validitas data dalam penelitian kualitatif ditentukan oleh kejelasan teknik pengumpulan data, triangulasi, dan kredibilitas sumber informasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan dari Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Knill dan Tosun (2020). Dalam teori ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa dimensi utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan yang meliputi pemilihan instrument kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial.

3.1. Implementasi Kebijakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

a. Pemilihan Instrumen Kebijakan

Pemilihan instrumen kebijakan merupakan salah satu dimensi penting dalam teori implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020). Dimensi ini berfokus pada bagaimana pemerintah memilih alat atau mekanisme tertentu yang dianggap paling efektif dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam konteks kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo, pemilihan instrumen menjadi krusial untuk mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat dari ketergantungan terhadap beras menuju pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, ubi, dan kacang-kacangan yang tersedia secara melimpah. Instrumen kebijakan dapat berupa regulasi, imbauan, pemberian insentif, edukasi, maupun sosialisasi yang bertujuan membentuk kesadaran dan kebiasaan baru di masyarakat.

Dari segi ketepatan, instrumen yang digunakan dalam kebijakan ini dinilai cukup sesuai dengan karakteristik permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 yang memuat sejumlah instrumen strategis, seperti imbauan konsumsi pangan lokal setiap hari Jumat, pengintegrasian konsumsi pangan lokal dalam agenda rapat pemerintah maupun sekolah, serta penyuluhan kepada kelompok masyarakat. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Carolina Datau, SP, pada wawancara tanggal 9 Januari 2025, menyampaikan bahwa kebijakan ini dilengkapi dengan surat edaran kepada ASN dan masyarakat umum untuk mendorong konsumsi pangan lokal. Ia menilai bahwa kebijakan ini sudah cukup tepat karena tidak hanya bersifat instruktif, tetapi juga disertai edukasi keamanan pangan kepada kelompok wanita tani (KWT) dan pelaku usaha agar pangan yang dikonsumsi bebas dari bahan kimia berbahaya.

Namun demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada ketepatan instrumen, tetapi juga pada kemudahan pelaksanaan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, meskipun dasar hukum dan instruksi telah tersedia dengan jelas, terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas kebijakan. Hambatan tersebut terutama berasal

dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi pangan lokal serta terbatasnya kemampuan ekonomi mereka dalam mengakses pangan sehat dan bergizi. Masih kuatnya preferensi masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokok juga menjadi tantangan tersendiri. Carolina Datau menjelaskan bahwa faktor ekonomi masyarakat dan kebiasaan konsumsi menjadi penghambat utama dalam penerapan kebijakan secara optimal, meskipun dari sisi regulasi dan penyuluhan telah cukup tersedia.

Selain dari sisi masyarakat, pelaksanaan kebijakan juga sangat bergantung pada dukungan kelembagaan yang sudah ada. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Darwan Usman, SP., M.Si, dalam wawancara pada 13 Januari 2025, menyatakan bahwa struktur kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang telah terbentuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program. Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa tantangan utama tetap berasal dari sisi masyarakat itu sendiri, terutama dalam hal selera konsumsi. Banyak masyarakat masih lebih memilih beras dibandingkan pangan lokal seperti jagung, meskipun jagung merupakan salah satu potensi sumber daya lokal yang strategis.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan telah memiliki landasan hukum yang jelas dan dukungan struktur pelaksana di lapangan, instrumen yang digunakan masih menghadapi tantangan dalam hal penerimaan sosial dan kesiapan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, selain memperkuat imbauan dan edukasi, diperlukan strategi yang lebih proaktif dan adaptif dalam menyentuh aspek budaya konsumsi serta memberikan insentif yang konkret untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pemilihan instrumen yang tepat tidak hanya dilihat dari kesesuaiannya dengan permasalahan, tetapi juga dari sejauh mana instrumen tersebut dapat diterapkan secara realistis dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

b. Desain Kebijakan

Desain kebijakan merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020), yang menekankan pada bagaimana kebijakan dirancang secara internal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Dimensi ini mencakup kejelasan prosedur, pengaturan waktu pelaksanaan, dan kecukupan sumber daya yang digunakan. Dalam konteks implementasi kebijakan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo, desain kebijakan memainkan peran vital karena menyangkut perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang bersifat jangka panjang dan memerlukan intervensi terstruktur dari pemerintah daerah.

Salah satu wujud desain kebijakan yang terstruktur dapat dilihat dari pelaksanaan program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) yang ditujukan kepada anak-anak penderita stunting. Program ini disalurkan dalam bentuk pemberian makan siang sebanyak 50 kali selama 50 hari berturut-turut. Dalam pelaksanaannya, program ini didukung oleh alur prosedur yang jelas, mulai dari penentuan bentuk bantuan, pengaturan jadwal pemberian makan, hingga pengelolaan anggaran yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo. Prosedur ini juga dilengkapi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi bantuan hortikultura, termasuk tomat, cabai, kacang panjang, kangkung, caisim, pupuk organik, dan media tanam seperti polybag.

Selain itu, desain kebijakan ini menunjukkan perencanaan yang sistematis dengan dukungan sumber daya kelembagaan dan teknis. Kegiatan penyuluhan kepada kelompok wanita tani dan pelaku usaha dilakukan untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi aspek keamanan dan kualitas. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti lembaga

pendidikan dan instansi pemerintahan, yang turut berperan dalam menyajikan pangan lokal dalam setiap pertemuan atau rapat resmi. Dukungan ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran peraturan, tetapi dirancang untuk terintegrasi dalam praktik sehari-hari masyarakat.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga menunjukkan karakteristik adaptif, terutama dalam merespons perubahan situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi konsumsi pangan masyarakat. Pendekatan berbasis tempat (*place-based approach*) menjadi kunci dalam memahami narasi ketahanan pangan dan memastikan kebijakan pangan mencerminkan konteks sosial budaya lokal” (Sonnino *et al.*, 2016). Misalnya, dalam menghadapi fluktuasi harga bahan pangan serta kondisi musim tanam dan panen, pelaksanaan kebijakan disesuaikan tanpa mengubah tujuan utamanya. Pemerintah daerah juga memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dengan memberikan akses pangan sehat secara langsung melalui berbagai program intervensi, serta melakukan edukasi tentang penggunaan bahan pertanian yang aman agar produksi pangan lokal tetap relevan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, desain kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo menunjukkan struktur pelaksanaan yang jelas dan relatif fleksibel. Kebijakan ini dirancang untuk dapat beradaptasi terhadap dinamika lokal, dengan dukungan prosedural, teknis, dan kelembagaan yang saling terintegrasi. Hal ini menjadi salah satu kekuatan dalam implementasi kebijakan, karena mampu menggabungkan aspek perencanaan yang terstruktur dengan kemampuan menyesuaikan kebijakan terhadap perubahan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut Hamdi (2014), implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada sejauh mana proses formulasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan didukung oleh pemahaman aktor pelaksana atas konteks lokal yang dihadapi.

c. Struktur Pengawasan

Struktur pengawasan merupakan salah satu dimensi penting dalam implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Knill dan Tosun (2020). Dimensi ini mengacu pada mekanisme kontrol yang berfungsi memastikan agar kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan dan arah yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan publik, pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat penerima manfaat. Mekanisme pengawasan yang efektif memungkinkan terjadinya koreksi, perbaikan, atau penyesuaian terhadap pelaksanaan kebijakan apabila ditemukan penyimpangan, hambatan, atau ketidaksesuaian dengan rencana awal.

Di Kabupaten Gorontalo, pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui keterlibatan aktif kelompok-kelompok lokal seperti Kelompok Wanita Tani (KWT). Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan teknis kegiatan, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan hingga evaluasi program di tingkat desa. Keberadaan KWT memainkan peran strategis sebagai aktor pengawas informal yang mampu memberikan masukan langsung terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Mereka mengawasi distribusi dan pemanfaatan bantuan pangan, memastikan keberlangsungan pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk budidaya pangan lokal, serta turut memberikan pengawasan moral terhadap perilaku konsumsi masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Pengawasan oleh masyarakat juga berlangsung secara tidak langsung melalui peran mereka sebagai penerima manfaat. Karena merasakan langsung dampak kebijakan, masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap kualitas implementasi, efektivitas distribusi, maupun ketepatan sasaran program. Dalam program-program seperti Limboto Cerdas Pangan, misalnya, masyarakat terlibat dalam pengelolaan pekarangan rumah

untuk produksi pangan lokal yang tidak hanya dikonsumsi oleh keluarga, tetapi juga dapat dijual sebagai tambahan pendapatan. Keterlibatan ini menjadikan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang memperkuat akuntabilitas program secara kolektif.

Sementara itu, pengawasan oleh badan atau lembaga formal di tingkat Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya terlembagakan dalam bentuk badan pengawas khusus. Fungsi pengawasan formal masih dijalankan oleh dinas teknis pelaksana melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring ini mencakup pengecekan administrasi pelaksanaan program, verifikasi langsung di lapangan, serta pengujian sampel bahan pangan untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi. Pelaksanaan pengawasan internal ini menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan stakeholder terkait.

Dengan demikian, struktur pengawasan terhadap implementasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo mencerminkan kombinasi antara mekanisme pengawasan formal oleh dinas teknis dan pengawasan sosial oleh masyarakat. Keterlibatan aktif kelompok masyarakat seperti KWT menjadi penguat dalam memastikan kebijakan tetap berjalan di jalur yang diharapkan, meskipun kelembagaan pengawasan formal masih bersifat internal. Penguatan kedua bentuk pengawasan ini menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kesinambungan kebijakan di tingkat lokal.

d. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Knill dan Tosun (2020). Dimensi ini menyoroti bagaimana struktur dan konfigurasi organisasi dibentuk untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Desain kelembagaan mencakup pembagian peran antar lembaga, jumlah organisasi yang terlibat, serta mekanisme koordinasi yang dilakukan. Sistem pangan perlu dipahami melalui hubungan politik-ekologisnya yang membentuk akses, keadilan, dan keberlanjutan (Moragues-Faus & Marsden, 2017). Jika struktur kelembagaan tidak ditata dengan baik, maka potensi tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, atau bahkan terjadinya konflik peran bisa menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks implementasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo, sejumlah organisasi pemerintah terlibat aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Organisasi-organisasi tersebut meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta instansi lainnya seperti TP-PKK, aparat desa, dan lembaga pendidikan. Selain itu, unsur masyarakat juga dilibatkan melalui kelompok wanita tani, UMKM penyedia pangan lokal, pelaku usaha pangan segar, serta pendamping gizi di tingkat desa. Keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya dukungan teknis dalam analisis konsumsi melalui aplikasi survei konsumsi pangan. Keterlibatan berbagai pihak ini memperlihatkan adanya desain kelembagaan yang bersifat kolaboratif dan lintas sektor.

Meskipun jumlah organisasi pelaksana cukup beragam dan sesuai dengan kebutuhan kebijakan, beberapa catatan menunjukkan bahwa pembagian peran di antara instansi terkait masih perlu ditegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakjelasan pelaksanaan. Masing-masing organisasi memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, seperti Dinas Kesehatan yang fokus pada aspek gizi dan kesehatan pangan, Dinas Pertanian pada produksi dan ketersediaan pangan lokal, serta Dinas Ketahanan Pangan sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan program.

Adanya pelibatan unsur pendidikan juga bertujuan untuk membangun kesadaran sejak dini tentang pentingnya konsumsi pangan lokal yang beragam dan bergizi.

Dari segi koordinasi antarorganisasi, pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh adanya pertemuan rutin lintas instansi yang diselenggarakan setiap bulan. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, merumuskan strategi bersama, serta menyelesaikan kendala teknis di lapangan. Beberapa kegiatan yang memerlukan koordinasi tinggi, seperti sosialisasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) kepada pelaku usaha, dilaksanakan secara terintegrasi dengan dukungan sistem OSS (Online Single Submission). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi telah mulai dibangun secara formal dan terstruktur.

Secara keseluruhan, desain kelembagaan dalam implementasi kebijakan ini telah mencerminkan adanya kolaborasi lintas sektor yang cukup baik. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi koordinasi dan kejelasan peran masing-masing pihak. Hamid (2018) menyatakan bahwa manajemen pemerintahan daerah yang efektif membutuhkan sinergi antarlembaga, kejelasan tupoksi, serta koordinasi lintas sektor yang berkesinambungan. Semakin terdefinisi dan sistematis struktur serta koordinasi kelembagaan, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan dalam mendorong penganeekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo secara berkelanjutan.

e. Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Knill dan Tosun (2020), karena berkaitan langsung dengan kesiapan institusi pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien. Dimensi ini mencakup ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan informasi yang berfungsi mendukung seluruh proses implementasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tanpa dukungan administratif yang kuat, kebijakan yang telah dirancang dengan baik berisiko tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Di Kabupaten Gorontalo, pelaksanaan kebijakan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang cukup kompeten dan dukungan teknologi informasi yang mulai terbangun. Struktur SDM di berbagai OPD seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian telah diisi oleh tenaga-tenaga fungsional seperti penyuluh, petugas lapangan, dan fasilitator kelompok tani yang menjalankan berbagai program strategis. Teknologi juga telah dimanfaatkan dalam bentuk sistem OSS (Online Single Submission) serta aplikasi survei konsumsi pangan yang digunakan dalam kerja sama dengan Badan Pusat Statistik.

Namun demikian, meskipun secara umum sumber daya tersedia, dari sisi kecukupan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam hal pendanaan. Anggaran yang bersumber dari APBD masih terbatas, sehingga pelaksanaan banyak program bergantung pada dana dekonsentrasi dari pemerintah provinsi. Ketergantungan ini berdampak pada fleksibilitas dan keberlanjutan program di tingkat kabupaten, khususnya ketika dana dekonsentrasi mengalami keterlambatan atau pengurangan. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel juga menjadi hambatan, terutama untuk menjangkau seluruh wilayah sasaran secara merata.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah daerah berupaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui kerja sama lintas sektor, penugasan ulang personel, serta penyusunan prioritas kegiatan yang terukur. Pendekatan ini dilakukan agar implementasi kebijakan tetap dapat berjalan meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Upaya-upaya ini mencerminkan adanya fleksibilitas

administratif yang penting dalam mempertahankan kesinambungan pelaksanaan program.

Selain sumber daya, keberadaan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menjadi bagian dari kemampuan administratif yang berperan penting. SOP digunakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai alur yang seragam, sistematis, dan terukur. Dalam konteks kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal, SOP diterapkan dalam berbagai kegiatan seperti pengujian pestisida melalui rapid test, pelaksanaan program B2SA, hingga pendataan neraca konsumsi pangan. SOP tersebut menjadi acuan teknis yang membantu para pelaksana kebijakan agar dapat menjalankan tugas secara konsisten dan efisien.

Secara keseluruhan, kemampuan administratif Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan kebijakan ini dapat dikatakan cukup memadai dari sisi struktur dan dukungan teknis, namun masih menghadapi tantangan pada aspek kecukupan anggaran dan penyebaran tenaga pelaksana. Dengan adanya SOP yang diterapkan secara konsisten serta upaya kolaboratif antarinstansi, pelaksanaan kebijakan tetap dapat berjalan dengan baik meskipun belum mencapai kondisi ideal. Ke depan, penguatan kapasitas administratif perlu terus dilakukan untuk menjamin keberhasilan kebijakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

f. Penerimaan Sosial

Penerimaan sosial merupakan dimensi terakhir dalam teori implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020) yang menyoroti sejauh mana kebijakan publik mampu merespons kondisi nyata masyarakat serta ekspektasi yang berkembang. Dimensi ini menekankan pentingnya kepekaan kebijakan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal. Responsivitas kebijakan mencerminkan kesanggupan pemerintah dan pelaksana untuk menyesuaikan pendekatan implementasi tanpa mengorbankan tujuan utama yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tingkat penerimaan sosial menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan sebuah kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo, responsivitas tercermin dari sejumlah penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Berbagai program telah diarahkan tidak hanya untuk mendorong konsumsi pangan lokal, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat tentang manfaat pola makan sehat dan mandiri melalui pemanfaatan sumber daya di sekitar. Penyuluhan, pembagian bibit, bantuan pangan lokal, serta pelatihan pengelolaan kebun rumah tangga menjadi strategi utama dalam menjangkau masyarakat dengan pendekatan yang kontekstual.

Dari sisi manfaat yang dirasakan, kebijakan ini telah memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang pola konsumsi pangan bergizi dan beragam. Beberapa penerima program menyatakan bahwa bantuan dan penyuluhan yang mereka terima telah mendorong mereka untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman pangan lokal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Selain itu, manfaat kesehatan juga mulai dirasakan, seperti menurunnya frekuensi sakit pada anak-anak karena konsumsi sayuran segar yang ditanam sendiri.

Namun demikian, manfaat yang dirasakan belum sepenuhnya merata atau menjangkau seluruh aspek kebutuhan masyarakat. Sebagian petani menilai bahwa bantuan yang diterima belum cukup memadai untuk mendukung kegiatan pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam hal pembiayaan operasional atau dukungan alat produksi. Karena itu, sebagian hasil panen lebih banyak dijual untuk kebutuhan ekonomi, dibandingkan dikonsumsi sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan

telah memberikan dampak positif, terdapat keterbatasan dalam hal daya dukung kebijakan terhadap tujuan ekonomi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Di beberapa wilayah, partisipasi masyarakat sudah mulai tumbuh melalui kegiatan kelompok tani, pelatihan, dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh dinas teknis. Kegiatan ini memperlihatkan adanya dorongan partisipatif yang tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga inklusif dan mendorong inisiatif lokal. Masyarakat yang merasa dilibatkan secara langsung cenderung menunjukkan antusiasme lebih tinggi dalam menjalankan program, termasuk berbagi hasil kebun dengan tetangga atau menyebarkan informasi kepada komunitas sekitarnya.

Meskipun partisipasi sudah mulai tampak, tantangan masih ada dalam bentuk persepsi dan minat masyarakat yang belum sepenuhnya merata. Beberapa kelompok masyarakat masih memandang program ini tidak memberikan hasil ekonomi yang cepat, sehingga kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan penguatan pada aspek insentif sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas. Keadilan dalam kebijakan pangan tidak hanya mencakup akses terhadap pangan, tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lokal (Moragues-Faus, 2017). Dukungan berkelanjutan dan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam membangun penerimaan sosial yang kuat terhadap kebijakan ini.

Setelah menganalisis enam dimensi implementasi kebijakan berdasarkan kerangka Knill dan Tosun (2020), yakni pemilihan instrumen, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan social, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan struktural dan kesiapan sosial masyarakat. Namun demikian, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung dan tantangan penghambat yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana faktor-faktor eksternal tersebut melengkapi gambaran utuh dari pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana pemerintah daerah meresponsnya melalui upaya strategis.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dari sisi faktor pendukung, implementasi kebijakan ini memiliki landasan regulatif yang kuat melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010. Keberadaan regulasi tersebut memberikan arah dan legitimasi bagi seluruh perangkat pelaksana kebijakan, serta menunjukkan komitmen politik daerah terhadap isu ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Selain itu, adanya sosialisasi dan edukasi yang terus dilakukan, baik kepada aparatur maupun masyarakat, turut membangun kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan lokal yang beragam dan bergizi. Kelompok strategis seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) juga berperan aktif dalam mendorong perubahan di tingkat rumah tangga melalui kegiatan edukatif dan produksi pangan lokal.

Kolaborasi lintas instansi, termasuk keterlibatan pelaku UMKM dan dunia usaha, menjadi faktor lain yang memperkuat implementasi. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta lembaga pendidikan dan masyarakat sipil terlibat dalam mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Program-program seperti B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta monitoring keamanan pangan juga memperkuat dimensi administratif dan teknis pelaksanaan kebijakan. Kebijakan ini pun dirancang secara fleksibel,

memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan musim, fluktuasi harga pangan, serta kondisi daya beli masyarakat, menjadikannya adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi lokal.

Namun demikian, implementasi kebijakan juga dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal. Preferensi terhadap beras masih tinggi karena dianggap sebagai simbol status sosial dan makanan utama. Keterbatasan ekonomi juga menjadi penghalang, terutama di daerah pedesaan di mana daya beli masyarakat rendah dan harga pangan lokal terkadang lebih mahal. Selain itu, minimnya alokasi anggaran daerah menyebabkan ketergantungan pada dana dekonsentrasi dari pemerintah provinsi, yang tidak selalu dapat diandalkan untuk pembiayaan jangka panjang.

Di sisi kelembagaan, pengawasan formal terhadap pelaksanaan kebijakan masih bersifat administratif dan belum ada lembaga khusus yang memantau secara menyeluruh. Keterbatasan penyuluhan juga menjadi hambatan karena belum merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan lambatnya perubahan perilaku konsumsi serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai nilai gizi dan manfaat pangan lokal.

Upaya Optimalisasi

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai upaya strategis. Salah satu langkah utama adalah edukasi pola konsumsi masyarakat melalui sosialisasi konsep B2SA. Edukasi ini tidak hanya menasar aspek gizi, tetapi juga mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Kegiatan edukatif dilakukan dengan pendekatan langsung ke kelompok strategis seperti KWT, serta dikombinasikan dengan demonstrasi pengolahan pangan agar masyarakat dapat lebih tertarik dan memahami secara praktis manfaat konsumsi pangan lokal.

Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan program pertanian skala kecil melalui pemanfaatan pekarangan rumah. Program ini dirancang agar masyarakat dapat menanam tanaman kebutuhan harian seperti cabai, tomat, jagung, dan sayuran lainnya secara mandiri. Selain memberikan akses pangan segar dan murah, program ini juga berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah dan memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Tanaman yang dipilih tidak hanya mudah dibudidayakan, tetapi juga bernilai ekonomi tinggi. Melalui pendekatan ini, masyarakat mulai terbiasa dengan konsumsi hasil kebun sendiri dan secara perlahan mengurangi ketergantungan pada pangan pokok berbasis beras.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas pelaku usaha juga menjadi fokus penting dalam mendukung sistem pangan yang sehat dan aman. Pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada pedagang, pelaku UMKM, dan pengelola pangan di pasar tradisional mengenai keamanan pangan, penanganan bahan makanan, serta penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Selain penyuluhan, dilakukan juga pengujian cepat (rapid test) kandungan pestisida di pasar-pasar tradisional untuk memastikan pangan yang beredar aman dikonsumsi. Upaya ini mendukung terbentuknya rantai pasok yang lebih sehat dari hulu ke hilir dan menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya keamanan pangan.

Secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan yang adaptif, dukungan lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan menjadi fondasi penting dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan komitmen berkelanjutan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subjek aktif dalam membentuk pola konsumsi yang lebih sehat, mandiri, dan berbasis sumber daya lokal.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) yang baru mencapai angka 79,60 mengindikasikan bahwa upaya penganekaragaman konsumsi pangan lokal belum optimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Heryadi dkk. (2024), yang menemukan bahwa konsumsi pangan lokal masih rendah akibat preferensi masyarakat terhadap beras dan minimnya pemahaman gizi. Sama halnya dengan temuan Heryadi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi gizi dan kebiasaan konsumsi turut memperlambat perubahan perilaku masyarakat terhadap pangan lokal.

Namun demikian, berbeda dengan studi Putri dkk. (2022) yang menyatakan bahwa program diversifikasi produk pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan konsumsi pangan lokal melalui peran aktif UMKM dan KWT, temuan penelitian ini justru menunjukkan bahwa partisipasi pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya insentif dan rendahnya daya dukung ekonomi terhadap pelaku usaha kecil. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan yang mengandalkan pendekatan regulatif dan sosialisasi saja tidak cukup tanpa diiringi strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang konkret.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Baderan (2024) yang menyatakan bahwa kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo telah dijalankan, namun belum mampu mencapai skor PPH ideal. Namun, penelitian ini memperluas cakupan dengan menguraikan secara lebih mendalam aspek kelembagaan dan koordinasi antar instansi yang dinilai masih berjalan secara sektoral. Hal ini berbeda dari fokus penelitian Baderan yang lebih menekankan pada hambatan administratif dan respons masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka teori Knill & Tosun (2020) yang menawarkan analisis implementasi kebijakan dari enam dimensi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas kebijakan. Simangunsong (2019) menegaskan bahwa analisis dalam penelitian pemerintahan harus mempertimbangkan dinamika aktor, struktur, dan kebijakan sebagai satu kesatuan sistemik.

Temuan lain juga sejalan dengan hasil studi Feriyanto dkk. (2017), yang menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi pangan unggulan lokal sangat bergantung pada kolaborasi antar sektor dan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis wilayah. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, sinergi antar OPD seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan memang telah ada, namun belum berjalan optimal akibat belum jelasnya pembagian peran. Berbeda dengan konteks Sleman yang memiliki pendekatan berbasis agropolitan, koordinasi lintas sektor di Gorontalo masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek strategis seperti insentif produksi atau integrasi dengan rantai pasok lokal.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai implementasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui pendekatan kebijakan daerah. Temuan ini memperlihatkan bahwa faktor struktural seperti desain kelembagaan, kapasitas administratif, serta penerimaan sosial menjadi aspek kunci yang membedakan antara keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga menambahkan pemahaman baru melalui pendekatan multi-dimensi yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik daerah.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah peran aktif Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pelaksana kegiatan edukasi pangan lokal di tingkat komunitas. Keberadaan KWT memperkuat jangkauan kebijakan hingga ke tingkat rumah tangga, khususnya dalam hal pengolahan dan konsumsi

pangan lokal. Keanekaragaman tanaman pangan dan ketahanan pangan lokal sangat dipengaruhi oleh organisasi sosial dan praktik komunitas di tingkat lokal (Labeyrie *et al.*, 2014). Keterlibatan langsung kelompok ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat akar rumput.

Temuan lain yang menonjol adalah masih kuatnya stigma sosial terhadap pangan lokal seperti jagung dan ubi yang dianggap sebagai makanan kelas bawah. Stigma ini menjadi hambatan kultural yang tidak kalah penting dibandingkan hambatan struktural. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, perubahan persepsi ini berjalan lambat karena menyangkut identitas sosial dan kebiasaan turun-temurun. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komunikasi publik yang lebih kreatif dan bersifat kultural untuk mengangkat citra pangan lokal sebagai simbol gaya hidup sehat dan modern.

Selain itu, fleksibilitas kebijakan daerah menjadi kekuatan tersendiri yang ditemukan dalam penelitian ini. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan terhadap kondisi lokal, seperti musim panen, harga bahan pangan, dan daya beli masyarakat. Pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pemanfaatan pekarangan rumah menjadi contoh adaptasi kebijakan yang relevan dan kontekstual. Fleksibilitas ini memperlihatkan potensi besar dari kebijakan daerah yang berbasis kebutuhan lapangan, namun tetap memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai agar dapat dijalankan secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gorontalo. Meskipun kebijakan ini telah menunjukkan adanya inisiatif dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, dan masyarakat melalui program B2SA, P2L, dan pelatihan keamanan pangan, namun capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang baru mencapai 79,60 masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 95. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan analisis enam dimensi implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020), ditemukan bahwa berbagai kendala masih menghambat efektivitas kebijakan, terutama pada dimensi pemilihan instrumen kebijakan yang belum beragam, desain kebijakan yang minim indikator capaian, serta lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan berbasis data. Selain itu, pelaksanaan program masih bersifat sektoral dan belum didukung oleh koordinasi lintas instansi yang kuat, sehingga terjadi fragmentasi pelaksanaan di lapangan. Keterbatasan anggaran serta rendahnya kapasitas pelaksana turut memperlemah efektivitas kebijakan.

Dimensi penerimaan sosial juga menjadi tantangan besar karena masih rendahnya pemahaman dan literasi gizi masyarakat terhadap pangan lokal. Stigma negatif terhadap pangan seperti jagung dan ubi membuat pola konsumsi masyarakat sulit diubah. Secara keseluruhan, ketidakefektifan implementasi kebijakan dipengaruhi secara signifikan oleh lemahnya desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksana, serta edukasi publik yang berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan berbasis konsumsi lokal secara menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Gorontalo, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke daerah lain. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, sehingga belum mampu mengukur dampak kebijakan secara kuantitatif terhadap

perubahan pola konsumsi. Selain itu, keterbatasan waktu dan ketergantungan pada narasumber utama menjadi kendala dalam memperoleh data yang lebih luas dan beragam.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar mampu mengukur efektivitas kebijakan secara lebih menyeluruh. Studi perbandingan antar daerah serta evaluasi program seperti B2SA dan P2L juga perlu dilakukan untuk melihat praktik terbaik. Selain itu, pengembangan intervensi berbasis budaya lokal dan insentif ekonomi dapat menjadi strategi untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap konsumsi pangan lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo serta seluruh informan dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, kelompok tani, KWT, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan, informasi, serta kerja sama selama proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperkuat implementasi kebijakan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal di Kabupaten Gorontalo.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pangan Nasional. 2024. "Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional dan Provinsi Tahun 2019-2023." Diambil Direktori_Perkembangan_Konsumsi_Pangan_2019-2023_FINAL.pdf - Google Drive
- Baderan, T.S (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Gerakan Percepatan Penganekaagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. <http://eprints.ipdn.ac.id/16838/>
- Feriyanto, N., Maharika, I. F., & Firdaus, F. (2017). Diversifikasi Komoditas Pangan Unggulan Lokal Berbasis Agropolitan di Daerah Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. *Teknoin*, 23(2), 101–107. <https://doi.org/10.20885/teknoin.vol23.iss2.art8>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Harnanda, W. (2020). Implementasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru (Studi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Implementasi+Program+Peningkatan+Diversifikasi+dan+Ketahanan+Pangan+Masyarakat+di+Dinas+Ketahanan+Pangan+Kota+Pekanbaru+%28Studi+Kegiatan+Kawasan+Rumah+Pangan+Lestari+Tahun+2019%29.+&btnG=
- Heryadi, D. Y., Rofatin, B., Tedjaningsih, T., & Nurcahya, I. (2024). Implementasi Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Menu Keluarga untuk Menunjang Ketahanan Pangan. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1), 843. <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.12612>
- Irham, F., Fauzan, R. G., & Pramasha, R. B. (2024). Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. 2(11). <https://id.scribd.com/document/852419604/PERAN-SUMBER-DAYA-ALAM-DALAM-MENDORONG-PEREKONOMIAN-NASIONAL>
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy a New Introduction*. Red Globe Press.
- Labeurie, V., Rono, B., & Leclerc, C. (2014). How social organization shapes crop diversity: An ecological anthropology approach among Tharaka farmers of Mount Kenya.

- Agriculture and Human Values*, 31(1), 97–107. <https://doi.org/10.1007/s10460-013-9451-9>
- Moragues-Faus, A. (2017). Problematising justice definitions in public food security debates: Towards global and participative food justices. *Geoforum*, 84, 95–106. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.06.007>
- Moragues-Faus, A., & Marsden, T. (2017). The political ecology of food: Carving ‘spaces of possibility’ in a new research agenda. *Journal of Rural Studies*, 55, 275–288. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.08.016>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Putri, R. A., Kumalasari, I. D., & Utama, B. (2022). Implementasi Program Diversifikasi Produk Pangan Lokal di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. *Mediagro*, 18(1), 10–22. <https://doi.org/10.31942/mediagro.v18i1.4973>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Situmorang, E. A. A., Deyren, D. F., Tamaria, T. br. S., & Tasya, T. A. M. (2024). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2060–2065. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.308>
- Sonnino, R., Marsden, T., & Moragues-Faus, A. (2016). Relationalities and Convergences in Food Security Narratives: Towards a Place-Based Approach. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 41(4), 477–489. <https://doi.org/10.1111/tran.12137>
- Stein, A. J., & Santini, F. (2022). The sustainability of “local” food: A review for policy-makers. *Review of Agricultural, Food and Environmental Studies*, 103(1), 77–89. <https://doi.org/10.1007/s41130-021-00148-w>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taherdoost, H. (2022). What are Different Research Approaches? Comprehensive Review of Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Research, Their Applications, Types, and Limitations. *Journal of Management Science & Engineering Research*, 5(1), 53–63. <https://doi.org/10.30564/jmser.v5i1.4538>
- Widiyati, A. (2012). Penerapan Prinsip Geografi Untuk Konservasi Sumber Daya Alam di Wilayah Bogor Barat Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Jurnal Geografi*, 12 Nomor 1, 16. <https://doi.org/10.17509/gea.v12i1.2594>